

Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Pulau Penyengat

Jesica Pasaribu

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Fitri Kurnianingsih

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Umrah Umrah

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Alamat: Jalan Raya Dompok, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau

Korespondensi penulis: jesticapasaribu707@gmail.com

Abstract. This research refers to Regional Regulation No. 8 of 2018 of Tanjungpinang City, Chapter IV concerning Management of Tourism Objects article 7 (seven) paragraph 1 (one) which reads that those responsible for managing Penyengat Island cultural tourism are carried out by the Regional Government. The purpose of this research is to analyze the role of the Tanjungpinang City Culture and Tourism Office in developing tourism objects on Penyengat Island. The research method used is Descriptive Qualitative with a case study approach to determine the results in the study, with data collection techniques by observation, interview and documentation. The results showed that the Tanjungpinang City Culture and Tourism Office in implementing the Penyengat Island management policy was assisted by the Penyengat Island community in the form of a Tourism Awareness Group (POKDARWIS) which helped the Tanjungpinang City Culture and Tourism Office in implementing the Penyengat Island management policy. The conclusion of this research is that the policy evaluation process carried out by the Tanjungpinang City Culture and Tourism Office is to revitalize several parts and develop tourism on Penyengat Island with a religious and Malay cultural base. Thus, Penyengat Island is able to be visited by tourists with the intention and purpose of knowing the historical heritage of the phallus kingdom.

Keywords: Evaluation Policy, Tourist Object, Destination

Abstrak. Penelitian ini merujuk kepada Peraturan Daerah No 8 tahun 2018 Kota Tanjungpinang, Bab IV tentang Pengelolaan Obyek Wisata pasal 7 (tujuh) ayat 1 (satu) yang berbunyi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan wisata budaya Pulau Penyengat dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang Dalam Mengembangkan Objek Wisata yang berada di Pulau Peyengat. Metode penelitian yang digunakan berupa Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan secara studi kasus untuk menentukan hasil dalam penelitian, dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat dibantu oleh masyarakat Pulau Penyengat yang berwujud Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang dimana membantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat. Adapun hasil kesimpulan dalam penelitian ini ialah, proses evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang adalah merevitalisasi beberapa bagian dan mengembangkan pariwisata di pulau penyengat dengan basis religius dan budaya melayu. Sehingga, pulau penyengat mampu di singgai oleh wisatawan dengan maksud dan tujuan mengetahui peninggalan sejarah dari kerajaan lingga.

Kata kunci: Kebijakan, Objek Wisata, Destinasi

LATAR BELAKANG

Peningkatan status Kota Tanjungpinang dari Kota Administratif menjadi Kota sesuai dengan UU No. 5/2001 pada bulan Agustus 2001 jelas berdampak positif bagi dunia budaya dan industri pariwisata. Signifikansi positif yang dimaksud adalah karena adanya satu kota, yaitu Kota Penyengat, yang di wilayah otonominya memiliki banyak benda-benda kuno, benda-benda warisan sosial dan lokal. Selain itu, Pulau Penyengat dan Malaysia memiliki hubungan sejarah yang unik karena merupakan bagian integral dari masa lalu kerajaan Riau Lingga (Melayu). Catatan sejarah menunjukkan bahwa Kerajaan Melayu Riau Lingga menyatukan Pulau Penyengat, Singapura, dan Johor Malaysia ke dalam satu kerajaan.

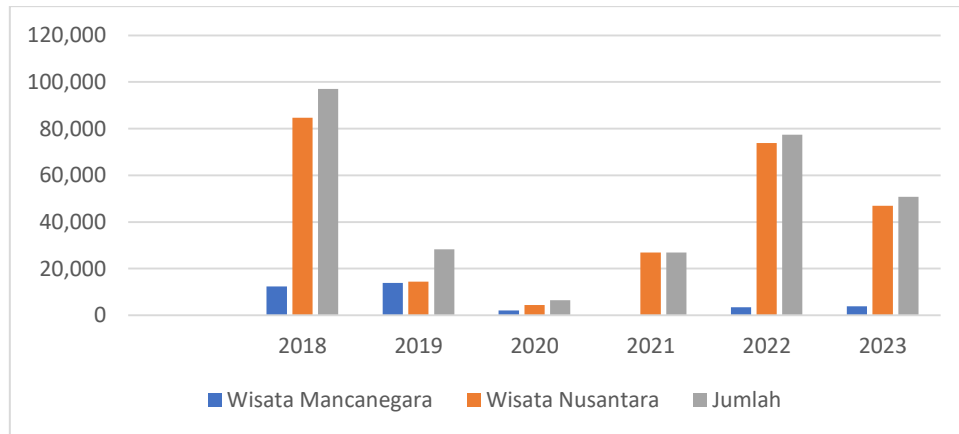
Tanjungpinang memiliki tempat wisata kuliner, misalnya mie bintang jalan bintang, rumah makan ikan sei enam, kafe mie tarempa, rumah makan bumi maitri, melayu square, nasi lemak gesek, akau potong lembu, hawai bistro, surya indah café, pondok makan sarbana dan lain-lain. Tanjungpinang juga memiliki oleh-oleh khas Tanjungpinang, yaitu Batik Gonggong, Bingka Pandan, Bilis Gulung, Tepung Gomak, Kue Batang Buruk, Kerupuk Gonggong dan Otak-Otak.

Beberapa objek wisata yang ada di pulau Penyengat Masjid Raya Sultan Riau Penyengat, Makam Engku Putri, Makam Raja Ali Haji, Makam Raja Haji Fisabilillah, Makam Raja Ja'far, Gedung Tengku Bilik, Istana Kantor, Bukit Kursi, dan Balai Adat.

Dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2018 Kota Tanjungpinang, Bab IV tentang Penyelenggara Wisata pasal 7 (tujuh) ayat 1 (satu) yang berbunyi bahwa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan wisata sosial Pulau Penyengat adalah Pemerintah Daerah, pada ayat 2 (dua) dinyatakan bahwa penyelenggaraan destinasi wisata Pulau Penyengat yang di dalamnya terdapat kawasan warisan sosial budaya dapat dilakukan persiapan, pelaksanaan dan pengawasan, dan pada ayat 4 (empat) penyelenggaraan industri wisata Pulau Penyengat diselesaikan atau diawasi oleh Dinas melalui UPTD. Alhasil, sesuai dengan Perda No. 1, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang meluncurkan paket wisata untuk mengelola wisata budaya Pulau Penyengat. 8 Tahun 2018 Kota Tanjungpinang.

Sebelum hadirnya paket kunjungan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang mengadakan kegiatan tahunan yang disebut dengan Perayaan Pulau Penyengat, dimana kegiatan ini sudah berlangsung cukup lama dimulai sekitar tahun 2016. Ada beberapa perlombaan yang diadakan, yaitu lomba panggak gasing, lomba jong, lomba mendayung sampan jelajah, lomba memukul dayung, lomba ngambat dik, lomba berbalas pantun, lomba berbalas gurindam, lomba desain, lomba napak tilas, dan beberapa senam. Dalam penyelenggaraan wisata Pulau Penyengat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membuat

paket wisata yang dapat mempermudah wisatawan untuk datang ke Pulau Penyengat. Ada delapan (delapan) rincian paket wisata yaitu: wisata Masjid Raya Penyengat (*Tour of the Mosque*), wisata sejarah Pulau Penyengat (*Tour History Culture*), Wisata Pakaian Adat (*Tour of the Island*), Wisata Sastra (*Littour*), Pagelaran Budaya (*Culper*), Wisata Gurindam (*Gurex*), Wisata Tanjak (*Tanjak Experience*), dan Wisata Memasak (*Cooclass*).\



Gambar 1. Jumlah Data Pengunjung Wisatawan 2018-2023

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, 2023

Melalui data gambar 1.1 dapat di ketahui bahwa, jumlah wisatawan dari tahun ke tahun mengalami trend naik turun, dengan dibuktikan nya pada Tahun 2020 yang mengalami kemerosotan paling bawah akibat Covid 19. Data yang diambil melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang ini di ketahui melalui data wisatawan nusantara Tahun 2018-2022 yang menginap di hotel-hotel Pulau Penyengat dan melalui pintu masuk Pelantar Kuning menuju Pulau Penyengat.

Berbagai kebijakan dan program telah dilakukan untuk meningkat wisatawan ke Kota Tanjungpinang, dan yang paling utama adalah Pulau Penyengat. Namun, masih di kira kurang dalam membantu mengatasi permasalahan wisatawan tiap tahun nya yang menjadi problematik tiap tahun. Sehingga, melalui Peraturan Daerah 08 Tahun 2018 Kota Tanjungpinang terkait Wisata yang berada di Pulau Penyengat. Kebijakan yang di ambil melalui peraturan yang telah di terbitkan tersebut masih di anggap memerlukan beberapa langkah pembaharuan dalam mengatasi permasalahan terkait objek wisata yang berada di Kota Tanjungpinang.

KAJIAN TEORITIS

1. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan sehingga sudah sewajarnya jika

kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi bahwa kebijakan dapat dilanjutkan, perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau harus dihentikan.

Kata Evaluasi bersal dari kata bahasa inggris yaitu *Evaluation* yang berarti penilaian atau penafsiran. Evaluasi dilakukan untuk mrngukur atau mengetahui bagaimana hasil terhadap kinerja kebijakan yang telah dibuat, dengan adanya evaluasi maka dapat diketahui apakah suatu kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan telah berhasil atau gagal mencapai tujuan awal dibuatnya kebijakan tersebut dan berdampak sesuai dengan apa yang di inginkan.

Adanya evaluasi maka akan terlihat seberapa jauh manfaat yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. (Wirawan, 2015) mengatakan bahwa: “Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, oeganisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya.

Evaluasi juga merupakan salah satu sarana yang penting dalam melakukan setiap kegiatan. Setiap berjalannya kegiatan biasanya evaluasi dilakukan untuk menilai dan mengkaji ulang, guna memperbaiki atau menilai kegiatan tersebut sudah sesuai dengan apa yang di inginkan”. Evaluasi merupakan tindakan mengamati serta melakukan ivestigasi efektifitas program, serta menilai kontribusi program terhadap suatu perubahan dan menilai kebutuhan untuk perbaikan, kelanjutan atau perluasan program. Sejalan dengan apa yang sudah dikemukakan oleh (Arikunto, 2009).

Model evaluasi CIPP mulai dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam pada tahun 1966. Stufflebeam mendefinisikan evaluasi sebagai proses melukiskan (delineating), memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif-alternatif pengambilan keputusan. Melukiskan artinya menspesifikasi, mendefinisikan, dan menjelaskan untuk memfokuskan informasi yang diperlukan oleh para pengambil keputusan.

Memperoleh artinya dengan memakai pengukuran dan statistik untuk mengumpulkan, mengorganisasi dan menganalisis informasi. Menyediakan artinya mensintensikan informasi sehingga akan melayani dengan baik kebutuhan evaluasi para pemangku kepentingan evaluasi. Stufflebeam menyatakan model evaluasi CIPP merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, produk,

institusi, dan sistem. Model ini dikonfigurasi untuk dipakai oleh evaluator internal yang dilakukan oleh organisasi evaluator, evaluasi diri yang dilakukan oleh tim proyek, atau penyedia layanan individual yang dikontrak atau evaluator eksternal.

2. Teori Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi Kebijakan menurut Muhadjir dalam (Widodo, 2008) yang dikutip oleh (Muhammad Firyal Akbar) yang evaluasi kebijakan merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. Bigman dan Felbinger, Howlet dan Ramesh (1995) mengelompokkan evaluasi menjadi tiga, yaitu:

1. Evaluasi Administratif: Yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif anggaran, efisiensi biaya dari proses kebijakan di dalam pemerintahan yang berkenaan dengan *Effort Evaluation, Performance Evaluation, Adequacy of Performance Evaluation, Efficiency Evaluation, and Process Evaluation*.
2. Evaluasi Judicial: Yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan di implementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.
3. Evaluasi Politik: Yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.

Menurut Lesler dan Steward menjelaskan bahwa evaluasi ditunjukkan untuk melihat sebagian kegagalan suatu kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Menurut Anderson memandang evaluasi sebagai sebuah proses penentuan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Wirawan menjelaskan “evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkan dengan indikator dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.”

Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Lebih lanjut Duun menjelaskan bahwa ada tiga pendekatan terhadap evaluasi yakni:

1. Evaluasi semu, pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok dan masyarakat.

2. Evaluasi formal, yaitu pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan.
3. Evaluasi proses keputusan teoritis, yaitu pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholders.

William N. Dunn menggambarkan kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut:

1. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, menyatakan bahwa: “Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter” (Dunn, 2003:429).
2. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Adapun menurut Dunn (2003:430) berpendapat bahwa: “Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per-unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien”.
3. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih

berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi

4. Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn, (2003:434) menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajiban.
5. Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut Dunn (2003:437) menyatakan bahwa responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn, (2003:437) pun mengemukakan bahwa: “Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan”.
6. Ketepatan Dalam proses ini keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tujuan kebijakan yang benar-benar tercapai berguna dan bernilai pada kelompok sasaran, mempunyai dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut. Melihat dari kriteria yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan tipe penelitian dari William N. Dunn sebagai bahan dasar acuan dalam penelitian. Merujuk pada berbagai permasalahan yang telah diungkapkan pada sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti akan menggunakan enam kriteria evaluasi Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.

Menurut Bridgman & Davis (2000:130) Pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu: (1) indikator input, (2) indikator process, (3) indikator outputs dan (4) indikator outcomes. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Indikator input memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.
2. Indikator process memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.
3. Indikator outputs (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.
4. Indikator outcomes (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Samodra W, Yuyun P, dan Agus Pramusito (1994:8) Kegiatan evaluasi ini dalam beberapa hal mirip dengan pengawasan, pengendalian, penyeliaan, supervisi, kontrol, dan pemantauan. Pelaku utama sudah jelas adalah pemerintah. Akan tetapi serigkali pelaku yang lain seperti lembaga penelitian yang independen.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif deskriptif, dengan pendekatan secara studi kasus. Penelitian ini juga memiliki fokus utama dengan mengkonsentrasikan pada bagian mengevaluasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2018 Kota Tanjungpinang terkait Penyelenggara Wisata Sosial di Pulau Penyengat, dengan mengetahui lebih lanjut. Penelitian ini juga diambil elalui sumber data yang relevan dengan menggunakan sumber primer dan sekunder, dengan melakukan pendekatan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini, penelitian membahas mengenai evaluasi kebijakan pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dalam mengembangkan objek wisata yang berada di Pulau Penyengat ialah,

terdapat beberapa hal yang dilakukan seperti, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang sudah berhasil melaksanakan efektivitas kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat, dan dalam indikator efektivitas sudah berhasil, dapat dibuktikan dengan terbentuknya Kelompok Sadar Wisata Pulau penyengat sebagai pelaksana dari kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaannya belum maksimal, yang dibuktikan dengan belum adanya agenda rapat atau pertemuan yang rutin dalam membahas kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat tersebut.

1. Efektivitas

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua, menyatakan bahwa: “Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

Persyaratan pertama dalam evaluasi kebijakan adalah mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah tersebut dapat diikuti. Dalam hal ini, pengelolaan Pulau Penyengat sudah diatur dalam Peraturan Daerah No 8 tahun 2018 Kota Tanjung Pinang, Bab IV tentang Pengelolaan Obyek Wisata, pada ayat 2 (dua) disebutkan bahwa pengelolaan objek wisata Pulau Penyengat yang didalamnya terdapat kawasan cagar budaya dapat dilakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, dan yang melaksanakan kebijakan ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang.

Dapat diambil kesimpulan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang sudah berhasil melaksanakan efektivitas kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat, dan dalam indikator efektivitas sudah berhasil, dapat dibuktikan dengan terbentuknya Kelompok Sadar Wisata Pulau penyengat sebagai pelaksana dari kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaannya belum maksimal, yang dibuktikan dengan belum adanya agenda rapat atau pertemuan yang rutin dalam membahas kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat tersebut.

2. Efisiensi

Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Adapun menurut Dunn (2003:430) berpendapat bahwa: “Efisiensi (*efficiency*)

berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per-unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien”. Efisiensi dalam hal ini merupakan sikap yang ditunjukkan sebagai pelaksana kebijakan dalam mendukung evaluasi kebijakan. Sikap para pelaksana dalam mendukung kebijakan pengelolaan wisata Pulau Penyengat sudah sangat baik dan sangat mendukung kebijakan tersebut.

Dalam mendukung kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat juga, POKDARWIS bersama masyarakat Pulau Penyengat melaksanakan gotong royong yang bertujuan dalam merawat cagar budaya yang terdapat di Pulau Penyengat. Program Paket Wisata merupakan usulan dan inisiatif dari Pokdarwis (kelompok sadar wisata) pulau penyengat. Program paket wisata ini juga didukung oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Pokdarwis melakukan tahap awal dengan melakukan pemetaan pada objek wisata, kemudian akan di pilah-pilah program paket wisata yang mana yang banyak di minati dan di kunjungi oleh pengunjung. Dalam perencanaan program paket wisata ini, masyarakat setempat ikut di sertakan.

Terutama pemangku kepentingan seperti transportasi laut pompong, becak, dan serta ibu-ibu kube. Adapun permasalahan yang di jumpai di indikator proses ini adalah Pokdarwis sendiri masih sangat kekurangan personil untuk dijadikan Tour Guide/ Intrepreter, masih belum bisa mempromosikan paket ini ke turis asing dari luar dikarenakan kendala menggunakan bahasa inggris, dan tidak ada nya ruang promosi untuk tourist information center. Sehingga Pokdarwis masih merasa Program Paket Wisata ini masih belum optimal.

Alternatif pemberian Program Paket Wisata secara tepat yang dilakukan oleh Pokdarwis (kelompok sadar wisata) melalui pemberian informasi yang terdiri melalui Facebook, Instagram, Genpi (Generasi Pesona Indonesia) dan Hpi (Himpunan Pamuwisata Indonesia). Program Paket Wisata ini dibuat untuk membantu penghasilan masyarakat setempat. Maksud dari tujuan program paket wisata ini adalah untuk membantu dan menginformasikan kepada pengunjung tentang kisah sejarah pada objek wisata yang ingin dilihat.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif 16 yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Kecukupan Sarana dan Prasarana dalam sumber daya adalah semua yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat. Sarana dan prasarana yang menjadi faktor pendukung dalam mencapai keberhasilan kebijakan pengelolaan di Pulau Penyengat seperti Becak motor (BENTOR) dan *Touristme Information Center* (TIC).

Dari hasil wawancara dari beberapa narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa Kecukupan yang ada di Pulau Penyengat sudah cukup bagus dan terawat dan membuat wisatawan nyaman dalam berwisata di Pulau Penyengat tetapi ada yang menjadi kekurangan dalam sarana dan prasarananya yaitu jalan yang sudah mulai rusak dan pelantar Pulau Penyengat yang perlu di perbaiki dan dirapikan.

Kewenangan dalam indikator kecukupan dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat sudah cukup baik dalam pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab masing- masing pelaksana kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat. Sebagai contoh dengan adanya gotong royong yang dilaksanakan dalam pemeliharaan situs cagar budaya Pulau Penyengat. Indikator informasinya juga sudah terlaksana dengan baik dengan adanya koordinasi yang secara lisan tetapi tersampaikan dengan baik.

4. Perataan

Dunn, (2003:434) menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Sumber daya manusia yang berjumlah cukup dan memiliki kemampuan dan keterampilan yang cukup dapat melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Sumber daya manusia dalam hal ini personil dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan

dan perawatan cagar wisata Pulau Penyengat masih kurang cukup personil dalam melakukan koordinasi pengelolaan dan perawatan cagar wisata yang ada di Pulau Penyengat.

Dari hasil wawancara dari kedua narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam hal ini kualifikasi setiap pelaku wisata sudah diberikan pelatihan pelatihan yang cukup dalam menunjang pelaksanaan pengelolaan wisata Pulau Penyengat, dan kecukupan sumber daya nya masih dikatakan kurang, ini menjadi hambatan dalam melakukan pengelolaan Pulau Penyengat.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat dibantu oleh masyarakat Pulau Penyengat yang berwujud Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan dibantu oleh pihak swasta yang dimana membantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dalam kebijakan ini bertugas sebagai pengawas dalam jalannya kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada struktur birokrasi yang mengikat pihak pelaksana kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat sehingga penyebaran wewenang dan tanggung jawab kepada pihak pelaksana kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat menjadi terhambat.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut Dunn (2003:437) menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pada saat proses pokdarwis sudah memenuhi semua untuk melakukan dan membuat program paket wisata ini. Hanya saja menurut penulis program paket wisata ini belum berjalan secara optimal karena masih ada kendala yang terjadi seperti masih kurang nya anggota untuk dijadikan Tour Guide dan belum bisanya mempromosikan kepada Turis Asing dikarenakan Pokdarwis sendiri masih kendala untuk menggunakan Bahasa Inggris.

Dalam hal konsistensi tersebut, adalah evaluasi kebijakan akan berjalan efektif jika perintah pelaksanaan harus jelas dan konsisten. Dalam konsistensi komunikasi pada pengelolaan Pulau Penyengat tidak ada jadwal yang ditentukan untuk membahas permasalahan pengelolaan Pulau Penyengat.

6. Ketepatan

Ketepatan merupakan bentuk organisasi kerja yang kompleks dan dapat menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor. Dalam kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat, fungsi yang sangat penting dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat dikarenakan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang belum memiliki Standard Operational Prosedure (SOP) dalam melakukan pelaksanaan pengelolaan Pulau Penyengat tersebut, dikarenakan belum adanya struktur birokrasi yang khusus dalam melakukan pengelolaan Pulau Penyengat.

Melihat perbedaan yang ditimbulkan sebelum dan setelah adanya Program tersebut, apakah dampak dari Program Paket Wisata itu bersifat negatif atau positif bagi wisatawan yang berkunjung. Dampak merupakan perubahan kondisi fisik maupun sosial. Dampak juga terjadi akibat yang dihasilkan oleh suatu paksaan atau intervensi dari program kepada kelompok sasaran baik program tersebut sesuai dengan tujuan maupun tidak.

Adapun dampak yang terjadi dapat menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran dan adanya dampak akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran. Dampak yang dirasakan masyarakat setempat dan wisatawan yang datang berkunjung bersifat positif sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan bersama masyarakat setempat, dan wisatawan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini merujuk kepada hasil penelitian dan pembahasna yang peeliti urai dalam BAB 4, dimana pada proses evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang adalah merevitalisasi beberapa bagian dan mengembangkan pariwisata di pulau penyenagat dengan basis religius dan budaya melayu. Sehingga, pulau penyengat mampu di singgai oleh wisatawan dengan maksud dan tujuan mengetahui peninggalan sejarah dari kerajaan lingga. Selain itu, terdapat keimpulan utama dalam penelitian ini yang dijelaskana melalui indikator yang telah ditelaah melalui teori William N. Dunn (1999), yaitu:

Dari indikator efektivitas dapat dilihat dari dapat disimpulkan sudah terlaksana dengan baik dan tersalurkan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelaksana kebijakan yang terbentuk sebagai bentuk tersalurkannya kebijakan tersebut. Pelaksana kebijakan tersebut berasal dari masyarakat Pulau Penyengat sendiri, masyarakat ini membentuk sebuah Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dalam melaksanakan kebijakan

pengelolaan Pulau Penyengat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal dimana belum adanya jadwal rutin yang ditetapkan dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat.

Berdasarkan indikator efisiensi dapat dilihat dari bentuk dukungan dari masyarakat Pulau Penyengat dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat dengan cara merawat, menjaga dengan cara bergotong royong dalam menjaga kebersihan situs situs sejarah yang ada di Pulau Penyengat.

Berdasarkan Indikator Kecukupan adalah Sumber daya manusia yang didalamnya terdapat kecukupan dan kualifikasi, kewenangan, informasi dan sarana prasarana, dan terakhir sumber daya anggaran. Sumber daya manusia yang ada dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat sudah bagus hal ini dapat dilihat dari diberikannya pelatihan pelatihan yang dimana tujuannya untuk meningkatkan keahlian dan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat akan tetapi dalam pelaksanaannya, sumber daya manusianya kurang maksimal dalam melaksanakan kebijakan tersebut dikarenakan kurangnya personil atau anggota dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat tersebut.

Berdasarkan Indikator Perataan dalam mendukung terlaksananya kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat sudah cukup baik dan memerlukan beberapa perbaikan dalam mendukung terlaksananya kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat. Sumber anggaran dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat belum teranggarkan tiap tahunnya sehingga membuat terhambatnya pelaksanaan dari kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat tersebut.

Berdasarkan hasil, penulis menyimpulkan bahwa pada saat proses pokdarwis sudah memenuhi semua untuk melakukan dan membuat program paket wisata ini. Hanya saja menurut penulis program paket wisata ini belum berjalan secara optimal karena masih ada kendala yang terjadi seperti masih kurang nya anggota untuk dijadikan *tour Guide* dan belum bisanya mempromosikan kepada Turis Asing dikarenakan Pokdarwis sendiri masih kendala untuk menggunakan Bahasa Inggris.

Berdasarkan Indikator Ketepatan dalam pelaksanaan kebijakan penngelolaan Pulau Penyengat terdiri Ketepatan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang sudah melaksanakan kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat dengan cara bermitra dengan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan pihak –pihak swasta seperti travel agent, tetapi dalam mitra yang dibangun belum adanya struktur birokrasi yang lebih khusus dalam

melaksanakan pengelolaan dan pengawasan terhadap mitra yang dibangun untuk mencapai keberhasilan kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh Dosen yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini, terimakasih kepada Buk Fitri Kurnianingsih dan Pak Okparizan yang telah membimbing saya dalam penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Ardiansyah, H., Junianto, M. B. S., & Machfud, S. (2020). Sistem penunjang keputusan penentuan penerima dana bantuan rumah tidak layak huni dengan metode smarter dan topsis pada desa rawakalong. *Jurnal Saintekom*, 10(1), 26-36.
- Asa, D. M. (2015). *Enanganan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan*. 2, 2.
- Dika, A. F. (2021). *Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh Daerah Perkotaan Di Indonesia (Sebuah Studi Literatur)*. 1, 2.
- Farida, N. (2018). *Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh)*. Universitas Surakarta.
- Gede, I. W. K. A. (2020). *Analisis Dampak Program Bedah Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Tejakula Buleleng*. 9.
- Kasiami, S. (2019). *Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Bojonegoro. Ilmu Administrasi Negara*, 3.
- Khairunnisa. (2019). *Peranan Bsps Terhadap Ekonomi Dan Sosial Penerima Bantuan Di Kecamatan Simpang Empat*. 2.
- Kristiani, W. (2022). *Indikator Rumah Tidak Layak Huni dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Provinsi Jawa Tengah. Kediklatan Widya Praja*, 2.
- Muharam, R. S., & Rusli, B. (2019). *Implementasi Program Rumah Tidak Layak huni (Rutilahu) di Kabupaten Bandung. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 3(1).
- Nalatissifa, H., & Ramdhani, Y. (2020). Sistem Penunjang Keputusan Menggunakan Metode Topsis Untuk Menentukan Kelayakan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). *MATRIK: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer*, 19(2), 246-256.
- Nida, K. (2019). *Kinerja Organisasi Dinas Sosial Dalam Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni Sebagai Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Cirebon*. 1.

- Nisa, N. K., & Salomo, R. V. (2019). Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(1), 1-7.
- Nugroho, B. E., & Pradana, G. W. (2021). *Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya*. 9.